

**ANALISIS PRIORITAS PENGGUNAAN DAN REALISASI PELAPORAN
ALOKASI DANA DESA (ADD) SEBAGAI UPAYA UNTUK
MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PERBAIKAN INFRASTRUKTUR PADA DESA BANTENGMATI**

TUGAS AKHIR



Disusun Oleh:

Shilva Vilayli Akhsania

NIM. 49401900056

**PROGRAM STUDI D-III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2021

**ANALISIS PRIORITAS PENGGUNAAN DAN REALISASI PELAPORAN
ALOKASI DANA DESA (ADD) SEBAGAI UPAYA UNTUK
MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PERBAIKAN INFRASTRUKTUR PADA DESA BANTENGMATI**

TUGAS AKHIR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Akuntansi



Disusun Oleh :

Shilva Vilayli Akhsania

49401900056

**PROGRAM STUDI D-III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2021

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Shilva Vilayli Akhsania

Nim : 49401900056

Program Studi : D-III Akuntansi

Fakultas : Ekonomi UNISSULA

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir saya dengan judul

“ANALISIS PRIORITAS PENGGUNAAN DAN REALISASI PELAPORAN ALOKASI DANA DESA (ADD) SEBAGAI UPAYA UNTUK MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PERBAIKAN INFRASTRUKTUR PADA DESA BANTENGMATI”

merupakan hasil karya (bersifat original), bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk dicabut gelar yang telah saya peroleh.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Semarang, 15 Januari 2022

Yang Menyatakan,



METERAI
TEMPEL
1000
35AE0AJX613929183

(Shilva Vilayli Akhsania)

49401900056

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini diajukan oleh :

Nama : Shilva Vilayli Akhsania

NIM : 49401900056


Program Studi : D-III Akuntansi

Judul Tugas Akhir : Analisis Prioritas Penggunaan dan Realiasi Pelaporan
Alokasi Dana Desa (ADD) Sebagai Upaya Untuk
Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan
Perbaikan Infrastruktur Pada Desa Bantengmati

Semarang, 15 Januari 2022

Menyetujui

Dosen Pembimbing Lapangan


Mutoharoh, S.E., M.Sc.
S.E., M.Sc.
NIK. 211418030

Digitally signed by Mutoharoh,

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini diajukan oleh :

Nama : Shilva Vilayli Akhsania

NIM : 49401900056

Program Studi : D-III Akuntansi

Judul Tugas Akhir : Analisis Prioritas Penggunaan dan Realisasi Pelaporan
Alokasi Dana Desa (ADD) Sebagai Upaya Untuk
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan
Infrastruktur Pada Desa Bantengmati

Telah berhasil dipertahankan di hadapan penguji dan diterima sebagai bagian
persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Program
Studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Penguji 2

Semarang, 20 Januari 2022

Penguji 1



Digitally signed by Mutoharoh,

Mutoharoh, S.E., M.Sc.
S.E., M.Sc.
NIK. 211418030



(Dr. H. Kiryanto, SE, M.Si., Akt)
NIK. 211492004

Mengetahui,

Ketua Program Studi D3 Akuntansi Fakultas
Ekonomi UNISSULA



Digitally signed by Mutoharoh,

Mutoharoh, S.E., M.Sc.
S.E., M.Sc.
NIK. 211418030

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karuniannya kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul **“Analisis Prioritas Penggunaan Dan Realisasi Pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD) Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Pada Desa Bantengmati”**

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Studi D3 Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan dipergunakan untuk memperoleh gelar Ahli Madya

Penulis Menyadari bahwa bahwa penyelesaian Tugas Akhir ini tidak akan berhasil dan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan, bimbingan, dan Kerjasama serta dukungan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil, Maka dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Hj. Olivia Fachrunissa, SE., M.Si, Ph.D., selaku dekan fakultas ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Bapak Khoirul Fuad, SE., M.Si., Ak., CA., selaku ketua program studi D3 Akuntansi fakultas ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang selalu memberikan motivasi, arahan, serta bimbingan selama penyusunan tugas akhir ini
3. Ibu Mutoharoh, SE., M.Sc selaku dosen pembimbing yang telah memberikan saran serta bimbingannya dalam menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini
4. Kedua orang tua yang saya cintai, Bapak dan Almh Ibu yang telah memberikan kasih sayang serta dukungan ilmu dan materil untuk membantu dalam penyelesaian studi dari awal sampai akhir.

5. Ibu Provita Wijayanti, SE., M. Si selaku dosen wali Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang
6. Bapak Muhdor selaku Kepala Desa Bantengmati yang telah memberikan izin, dukungan, dan kepercayaan kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian pada desa bantengmati.
7. Bapak Sulaiman selaku Sekretaris Desa Bantengmati yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian dari awal sampai akhir, dan bimbingannya selama kegiatan magang.
8. Mba Yenny, Mas Tandho yang selalu mmeberikan bimbingan, ilmu, pengalaman, selama magang sampai akhir penyusunan tugas akhir
9. Seluruh perangkat desa bantengmati yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terimakasih banyak atas dukungannya
10. Seluruh teman teman seperjuangan D3 Akuntansi 2019, yang saling mendukung dan bekerjasama dalam penyelesaian tugas akhir ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuan dan dukungannya dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini.

Penulis berharap semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah SWT, penulis pemyadari bahwa dalam penulisan laporan tugas akhir ini masih banyak kekurangannya dan jauh dari kata sempurna. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan, Semoga laporan tugas akhir ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi para pembaca.

Semarang, 15 Januari 2021

Penulis



Shilva Vilayli Akhsania

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	0
HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN ORISINALITAS	0
HALAMAN PENGESAHAN	0
HALAMAN PENGESAHAN	0
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR BAGAN	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Penelitian	7
1.3.2 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Desa	9
2.2 Dana Desa	10
2.3 Alokasi Dana Desa (ADD)	11

2.4	Pengelolaan Keuangan Desa	12
2.4.1	Perencanaan Pembangunan Desa	13
2.5	Pemberdayaan Masyarakat	14
2.6	Pembangunan Desa	15
2.7	Kerangka Penelitian	17
BAB III METODE PENELITIAN.....		19
3.1	Jenis Penelitian	19
3.2	Subjek dan objek penelitian.....	19
3.3	Definisi Operasional.....	21
3.4	Data dan sumber Penelitian.....	22
3.4.1	Data	22
3.5	Metode Pengumpulan Data	23
3.5.1	Wawancara	24
3.5.2	Observasi.....	24
3.5.3	Dokumentasi	25
3.6	Teknik Analisis Data	25
BAB IV HASIL PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN.....		28
4.1	Gambaran umum pemerintahan desa	28
4.1.1	Sejarah singkat pemerintah Desa Bantengmati	28
4.1.2	Visi misi.....	28
4.1.5	Bentuk dan pelayanan birokrasi/administrasi Desa Bantengmati.....	30
4.2	Hasil pengamatan	33
4.2.1	Perencanaan pengelolaan dana desa.....	34
4.2.2	Prioritas penggunaan dana desa	37
4.2.3	Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa.....	43

4.3 Pembahasan	50
BAB V PENUTUP	58
5.1 Kesimpulan.....	58
5.2 Keterbatasan	59
5.3 Saran.....	59
LAMPIRAN	63



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Rincian Anggaran Alokasi Dana Desa.....	2
Tabel 3. 1 Informasi subjek penelitian.....	20
Tabel 3. 2 Definisi operasional	21
Tabel 4. 1 Batas wilayah Desa Bantengmati.....	28
Tabel 4. 2 Rencana pembangunan tahap I	39
Tabel 4. 3 Rencana pembangunan tahap II	39
Tabel 4. 4 Rencana pembangunan tahap III.....	40
Tabel 4. 5 Rencana pemberdayaan masyarakat	42
Tabel 4. 6 Realisasi ADD bidang pembangunan	45
Tabel 4. 7 Realisasi ADD Bidang Pemberdayaan	47



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur organisasi Pemerintah Desa Bantengmati 29



DAFTAR BAGAN

Bagan 2. 1 Siklus perencanaan pembangunan	13
Bagan 2. 2 Kerangka penelitian	18



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kartu Bimbingan	63
Lampiran 2 Pelaksanaan Musrenbangdes	64
Lampiran 3 pelaksanaan program posyandu	64



ABSTRAK

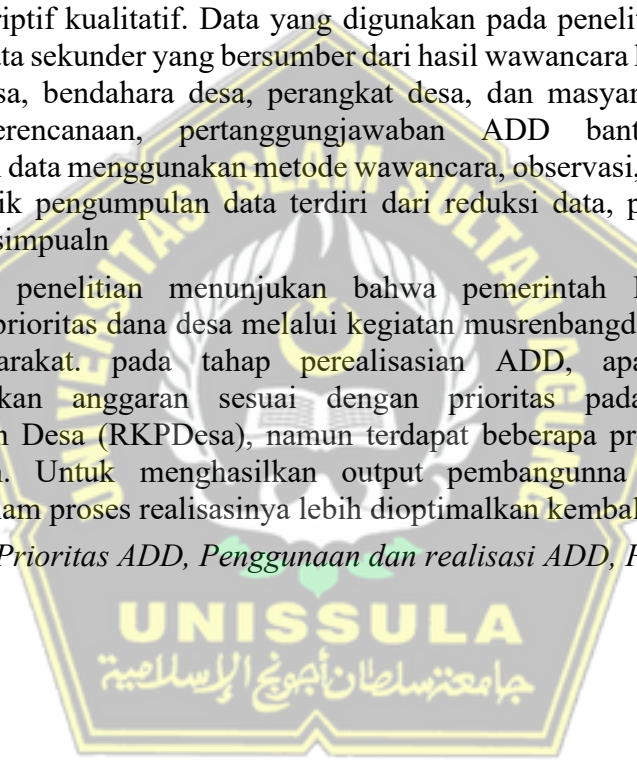
Shilva Vilayli Akhsania. Analisis Prioritas Penggunaan Dan Realisasi Pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD) Sebagai Upaya Untuk meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Dan Perbaikan Infrastruktur Pada Desa Bantengmati

Tugas Akhir ini bertujuan untuk menganalisis prioritas penggunaan dan realisasi pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai upaya untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan perbaikan infrastruktur pada Desa Bantengmati.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini, menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang bersumber dari hasil wawancara kepada kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, perangkat desa, dan masyarakat, serta laporan realisasi, perencanaan, pertanggungjawaban ADD bantengmati. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, serta dokumentasi. Adapun teknik pengumpulan data terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Bantengmati menetapkan prioritas dana desa melalui kegiatan musrenbangdes yang melibatkan unsur masyarakat. pada tahap perealisasi ADD, aparatur desa telah mengoptimalkan anggaran sesuai dengan prioritas pada Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa), namun terdapat beberapa program yang belum direalisasikan. Untuk menghasilkan output pembangunna yang berkualitas, sebaiknya dalam proses realisasinya lebih dioptimalkan kembali.

Kata kunci : Prioritas ADD, Penggunaan dan realisasi ADD, Pembangunan Desa



ABSTRACT

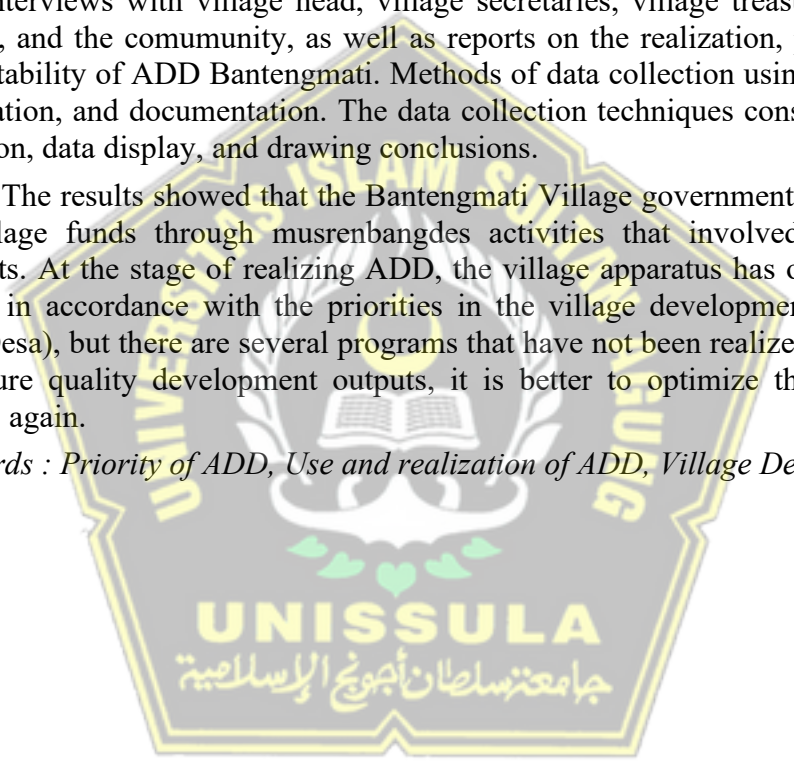
Shilva Vilayli Akhsania. Priority Analysis Of Use and Realization of Village Fund Allocation Reporting (ADD) As An Effort To Improve Community Empowerment and Infrastructure Improvement in Bantengmati Village

The final project aims to analyze the priority of use and realization of Village Fund Allocation (ADD) reporting as an effort to increase community empowerment and improve infrastructure in Bantengmati Village.

The research method used in this study, using a qualitative descriptive method. The data used in this study are primary data and secondary data sourced from interviews with village head, village secretaries, village treasurers, village official, and the community, as well as reports on the realization, planning and accountability of ADD Bantengmati. Methods of data collection using interviews, observation, and documentation. The data collection techniques consisted of data reduction, data display, and drawing conclusions.

The results showed that the Bantengmati Village government set priorities for village funds through musrenbangdes activities that involved community elements. At the stage of realizing ADD, the village apparatus has optimized the budget in accordance with the priorities in the village development work plan (RKPDesa), but there are several programs that have not been realized. In order to procedure quality development outputs, it is better to optimize the realization process again.

Keywords : Priority of ADD, Use and realization of ADD, Village Development



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Progres pembangunan dan perkembangan desa sekarang ini realisasi perbaikannya berjalan dengan cepat. Hal ini terlihat dari adanya kuantitas dana desa serta sumber pendapatan desa lainnya. Oleh sebab itu pemerintah desa harusnya bisa melaksanakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang tepat sasaran sebagai upaya untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah pada wilayahnya sendiri. Dana desa merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dianggarkan ke desa dan dialokasikan secara transfer melalui Anggaran Belanja dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota, dan diselenggarakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Secara umum, dana desa dijalankan secara tertib, efektif, efisien, hemat, transparan, akuntabel, dan sesuai berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan serta seimbang dalam semangat keadilan, berpedoman pada dan mengutamakan kepentingan masyarakat di daerah.

Menurut UU No. 6 Tahun 2004 tentang desa dan Peraturan pemerintah No. 43 Tahun 2014 yang membahas mengenai aturan tentang realisasi UU desa, dinyatakan bahwa setiap desa akan mendapatkan ADD yang di transfer kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000.000 untuk tiap-tiap desa dari pemerintahan pusat melalui APBN. Untuk itu dalam bidang pengelolaan keuangan desa dibutuhkan

keterampilan serta pengetahuan yang cukup dan kompeten untuk mengelola dana tersebut. Hal ini diharapkan agar pemerintahan desa mampu mengalokasikan kebijakan ADD menyesuaikan peraturan dan undang-undang yang sudah berlaku serta untuk meminimalisir terjadinya penyelewengan. Secara umum, banyak kepala desa dan perangkat Desa yang masih menemui kendala dalam bidang pengelolaan keuangan desa. Hal ini disebabkan karena masih minimnya pemahaman tentang pertanggungjawaban dan prosedurnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana prioritas penggunaan dan realisasi pelaporan ADD sebagai upaya untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan perbaikan infrastruktur pada Desa Bantengmati Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, sebagaimana informasi yang penulis peroleh secara langsung dari staff bagian siskeudes, anggaran dana Desa Bantengmati selama satu periode kerja yang dimulai dari bulan Januari sampai Desember 2021 adalah sebesar Rp. 1.203.027.000, yang akan direalisasikan dalam beberapa program. Namun, hingga saat ini beberapa kegiatan dari anggaran tersebut belum semuanya direalisasikan.

Tabel 1. 1 Rincian Anggaran Alokasi Dana Desa

No	Uraian/Kegiatan	Keterangan	Anggaran	Realisasi
1.	Sub. Bidang pendidikan		10.280.000	10.280.000
2.	Sub. Bidang Kesehatan	4 pos	161.200.000	161.200.000
3.	Sub. Bidang Pekerjaan		782.307.000	782.307.000

4.	Sub. Bidang Kawasan permukiman	3 RW	45.000.000	35.000.000
5.	Sub. Bidang pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga	5 orang	9.840.000	8.880.000
6.	Sub. Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan darurat dan Mendesak		194.400.000	174.400.000
JUMLAH			1.203.027.000	1.171.987.000

Sumber : Laporan realisasi ADD Bantengmati (2021)

Dengan demikian dapat diketahui bahwa terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dalam realisasi yang berkaitan dengan pemberdayaan atau perbaikan infrastruktur pada Bantengmati Kecamatan Mijen Kabupaten Demak. Dalam segala hal yang berhubungan dengan keuangan desa, pemerintah desa harus melaporkan kinerja APBDesa dan melaporkan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan APBDesa. Pelaporan pertanggungjawaban biasanya disusun melalui siklus pengelolaan keuangan desa, mulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan operasional, serta pelaporan dan pertanggungjawaban kepada pengelolaan keuangan desa. Namun, sumber daya manusia (SDM) yang berperan dan bertanggungjawab untuk desa masih belum sepadan secara kuantitas dan kualitas. Realisasi yang terjadi tentunya tidak terlepas dari kendala yang ada, begitu pula yang terjadi pada Bantengmati. Salah satu kendala umum yang

terjadi diantaranya seperti desa belum mempunyai prosedur, maupun sarana dan prasarana yang mendukung pengelolaan keuangan desanya, disamping itu juga masyarakat belum sepenuhnya ikut berpartisipasi atas pengelolaan APBDesa.

Penulis menemukan beberapa permasalahan dalam kaitannya dengan program pembangunan seperti program-program dijalankan pemerintah desa tidak diketahui oleh masyarakat. Artinya, dapat diasumsikan bahwa partisipasi masyarakat dalam hal pembangunan belum sepenuhnya terlibat. Masyarakat memiliki opini bahwa mereka tidak seharusnya ikut berpartisipasi dalam rencana kerja pemerintahan desa tersebut. Menurut Halim dan Iqbal (2012:18) definisi dari partisipasi berarti bahwa setiap warga negara berhak memilih dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui organisasi perwakilan yang sah secara hukum berdasarkan hak atas kebebasan berkomunikasi, berekspresi, dan berpartisipasi secara aktif dalam menentukan masa depan. Menurut Risya (2015:11) proses perbaikan infrastruktur dan pembangunan akan mudah terealisasi apabila dalam pengelolaan ADD dianggarkan secara tepat sasaran. Sehingga apabila instansi atau pengelola keuangan desa sudah melakukan tupoksinya maka sudah dapat dikatakan jika pengelola keuangan desa sudah melaksanakan akuntabilitasnya.

Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Demak Tahun 2021 Pasal 7 ADD dapat direalisasikan untuk penyelenggaraan berbagai program seperti realisasi pembangunan desa, pelaksanaan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, serta penanggulangan bencana, serta keadaan darurat dan mendesak. Pemberdayaan masyarakat pada

desa Bantengmati diarahkan sebagai suatu upaya untuk pemanfaatan secara efektif dan efisien sumber daya alam dan perbaikan SDM dengan cara memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Salah satunya melalui program *SDGs* desa yang memiliki target dalam upaya menjaga keberlanjutan kehidupan masyarakat, perbaikan serta untuk menjaga kualitas lingkungan hidup.

Secara umum, dalam pengelolaan ADD tidak hanya pihak instansi saja yang harus terlibat tetapi juga partisipasi dari masyarakat juga dibutuhkan, oleh sebab itu disini peneliti ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana prosedurnya dan pelaporannya dalam merealisasikan ADD. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Merina, dkk (2021) dalam penelitiannya pada desa Lubuk Kemiling menerangkan bahwa mekanisme penyelenggaraan pendistribusian dana desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 belum dilaksanakan secara selaras, UU Tahun 2014 No. 6 yang mengulas mengenai anggaran desa dan sumber pendapatan yang bermanfaat bagi pemerintah desa. Permasalahan yang dihadapi saat melaksanakan alokasi dana desa yaitu pada SDM nya, yang dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang belum tamat SD, serta masyarakat berpendapat bahwa mereka tidak berhak atas keuangan desa. Minang, dkk (2021) juga menyebutkan temuan yang senada bahwa alokasi dana desa menjadi terhambat dikarenakan kurangnya sosialisasi yang meluas di masyarakat, sehingga masyarakat tidak mengetahui tentang program ADD. Dari adanya faktor tersebut menyebabkan lemahnya pengawasan masyarakat tentang kegiatan ADD serta dengan adanya keterlibatan dari pemerintah kecamatan terhadap penyusunan surat pertanggungjawaban (SPJ) ADD

menghambat kemandirian desa. Selain itu, Umbing, dkk (2021) dalam penelitiannya pada Desa Ringinharjo menyatakan bahwa relevansi proses pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa belum sesuai dengan regulasi, penyebabnya adalah administrasi yang dilakukan pemerintah desa belum tertib, laporan pelaksanaan APBDes belum maksimal, penyerahan pertanggungjawaban APBDes belum sesuai, dan laporan kinerja serta pertanggungjawaban belum disosialisasikan secara maksimal terhadap warga desa.

Penelitian-penelitian terdahulu secara umum hanya berfokus pada satu permasalahan saja, dan sifatnya tidak secara menyeluruh mencakup semua aspek yang memiliki ketertarikan dengan pembangunan desa. Oleh karena itu, penelitian ini disajikan untuk menjawab permasalahan yang lebih menyeluruh dari sisi pengelolaan ADD dan alokasinya untuk pembangunan dan pemberdayaan. Selain itu, dari ketiga penelitian terdahulu dan penelitian saat ini mempunyai perbedaan waktu dan tempat penelitian, sehingga secara objektif permasalahan dan ruang lingkungannya juga berbeda. Disisi lain, dalam hal pengelolaan keuangan desa, kompetensi yang dimiliki oleh perangkat desa masih belum maksimal sehingga tidak menutup kemungkinan akan terjadi resiko kesalahan baik secara administratif maupun substantif yang menghambat realisasi dari rencana kerja pemerintahan desa. Berdasarkan latar belakang tersebut, disini kemudian penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul “Analisis Prioritas Penggunaan dan Realisasi Pelaporan ADD

Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Pada Desa Bantengmati.”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan masalah pokok tersebut, maka penulis mengembangkan masalah penelitian sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimanakah prioritas penggunaan ADD pada setiap output kegiatannya di Bantengmati?
- 1.2.2 Bagaimanakah realisasi pelaporan ADD pada rencana kerja pemerintahan Bantengmati?
- 1.2.3 Bagaimanakah upaya yang dilakukan pemerintah desa bantengmati dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan Perbaikan infrastruktur melalui ADD?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis prioritas penggunaan ADD pada setiap output kegiatannya di Bantengmati
2. Menganalisis realisasi pelaporan ADD pada rencana kerja pemerintahan Bantengmati
3. Untuk mengetahui upaya upaya yang dilakukan pemerintahan Desa Bantengmati dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat penelitian ini adalah:

- a. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan, dan pemahaman yang berkaitan dengan proses realisasi dan prioritas penggunaan alokasi dana desa, dan juga proses realisasi pada bidang kemasyarakatan dan juga infrastruktur.
- b. Bagi akademisi, diharapkan dapat menjadi referensi sebagai bahan kajian yang informatif membahas rumusan masalah yang sama di kemudian hari, serta melengkapi referensi dalam publikasi lain yang berbeda bidang profesi akuntansi, khususnya instansi pemerintah.
- c. Bagi instansi pemerintah yang ada di Desa Bantengmati diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan yang terkait dengan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa.
- d. Bagi masyarakat Desa Bantengmati diharapkan mampu memberikan informasi tambahan dan bisa dijadikan sebagai pedoman oleh masyarakat setempat yang digunakan sebagai sarana untuk mengetahui pelaporan dana desa dan program yang dijalankan oleh pemerintahan Bantengmati

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat dengan wilayah yang batas nya mempunyai kekuasaan untuk menyelenggarakan dan mengelola urusan pemerintahan, kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut yang diakibatkan dari perbuatan masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang sudah diakui dan dihargai dalam perangkat pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Definisi dari desa menurut Widjaya (2013) adalah kesatuan hukum dengan sistem pemerintahan oleh kepala desa sebagai pemimpin.

Pelaksanaan kelola desa melibatkan lembaga yang disebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, diartikan sebagai lembaga yang anggotanya terdiri dari pemerintahan wakil-wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan daerah dan melakukan fungsi pemerintahan yang diprakarsai secara demokratis. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa menyebutkan bahwa Peran BPD adalah membahas dan menyepakati rancangan penyelesaian desa dengan kepala desa, mengkaji dan mengkategorikan keinginan desa dan memantau pelaksanaan kinerja kepala desa.

2.2 Dana Desa

Keuangan desa merupakan hak dan kewajiban desa yang mampu diukur berdasarkan uang dan semua yang merupakan uang serta barang yang memiliki keterikatan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. APBDesa ini merupakan rencana keuangan tahunan desa yang berisikan hak dan kewajiban desa (Zulaifah, 2020). Bersumber pada PP No. 60 Tahun 2014, dana desa menjadi prioritas pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat. Prioritas pengembangan dan pemberdayaan masyarakat tersebut dipublikasikan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 beberapa tujuan dana desa, yaitu:

1. Pelayanan publik di pedesaan meningkat
2. Pengentasan kemiskinan
3. Pembangunan perekonomian
4. Kesenjangan pembangunan antar desa berkurang
5. Memberdayakan masyarakat pedesaan sebagai bahan pembangunan

Dalam Buku Saku Desa (2017: 22) pelaksanaan prioritas pembangunan dana desa oleh pemerintah desa harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut,:

1. Keadilan, hak dan kepentingan semua penduduk harus ditekankan tanpa memandang ras, suku atau asal daerah
2. Mengutamakan kebutuhan, kepentingan masyarakat desa, dan memprioritaskan keadaan darurat desa
3. Kewenangan desa, hak otoritas asal dan kewenangan lokal di tingkat pedesaan harus diutamakan

4. Partisipatif, kreativitas masyarakat dan prakarsa harus diutamakan.
5. Desa swakelola dan berbasis sumber daya manusia, menjalankan otonomi dalam pemanfaatan sumber daya desa, mengutamakan sumber daya manusia dan intelektual lokal.
6. Tipologi desa, memperhatikan aspek geografis, aspek sosiologis, aspek antropologis ekonomi, dan aspek ekologi diarahkan pada perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.

2.3 Alokasi Dana Desa (ADD)

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 mendefinisikan Dana desa merupakan dana dari APBN yang dialokasikan kepada desa lewat anggaran pendapatan dan belanja daerah di kabupaten/kota. Dana desa difungsikan guna mendanai pelaksanaan pemerintah, pembangunan pemerintahan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Menurut undang-undang, distribusi anggaran desa merupakan anggaran perbandingan yang telah diterima oleh kabupaten/kota setelah dikurangi dana khusus APBD berdasarkan pendapatan dan belanja kabupaten/kota. Menurut ayat (1) jumlah alokasi dana desa sedikitnya 10% persen dari kompensasi yang dibayarkan, termasuk ke dalam anggaran pendapatan dan belanja kabupaten atau kota, setelah dikurangi alokasi dana khusus. Pada saat penetapan penyaluran keuangan desa, APBD perlu memperhatikan rasio maupun nilai dalam anggarannya, yaitu sebagai berikut:

1. Setidaknya 70% dari total cap dana desa dialokasikan untuk menangani biaya pelaksanaan pemerintahan, pembinaan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa.

2. Maksimal 30% dari total cap belanja desa dialokasikan untuk pendapatan dan tunjangan kepala desa beserta perangkatnya, kegiatan pemerintahan, tunjangan dan kegiatan badan permusyawaratan desa, dan prioritas kesepakatan RT, RW.

Menurut Rembang, dkk. (2020) pemberian Alokasi dana desa dimaksudkan untuk merangsang atau menyuntikkan dana yang digunakan untuk mendukung dan menangani biaya program pemerintah desa, seperti partisipasi pada program pemerintah dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi dana desa pada APBD kabupaten/kota diperhitungkan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, yang mana mekanisme untuk pencairan dana dilaksanakan melalui beberapa tahapan atau menyesuaikan kemampuan dan keadaan pemerintahan daerah. Sementara tujuan dari pemberian bantuan dana desa adalah sebagai berikut:

- a. Pengentasan kemiskinan dan defisit anggaran
- b. Untuk meningkatkan program pembangunan dan perhitungan dana di tingkat pedesaan untuk pemberdayaan masyarakat
- c. Meningkatkan infrastruktur pedesaan
- d. Meningkatkan pengamalan nilai nilai agama dan sosial budaya untuk mencapai perbaikan sosial
- e. Meningkatkan pendapatan desa melalui BUMDes

2.4 Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 2 ayat 1, keuangan desa dikelola dengan prinsip sebagai berikut:

1. Transparansi

Prinsip keterbukaan yang membolehkan masyarakat memiliki pengetahuan dan memiliki akses informasi mengenai keuangan desa seluas mungkin.

2. Asas Akuntabel

Pemenuhan kewajiban dengan tujuan bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengendalian sumber daya, serta penyelenggaraan kebijakan, untuk mencapai tujuan yang sudah diresmikan.

3. Asas Partisipatif

Terselenggaranya pemerintahan desa yang mencakup kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa

4. Tertib dan disiplin

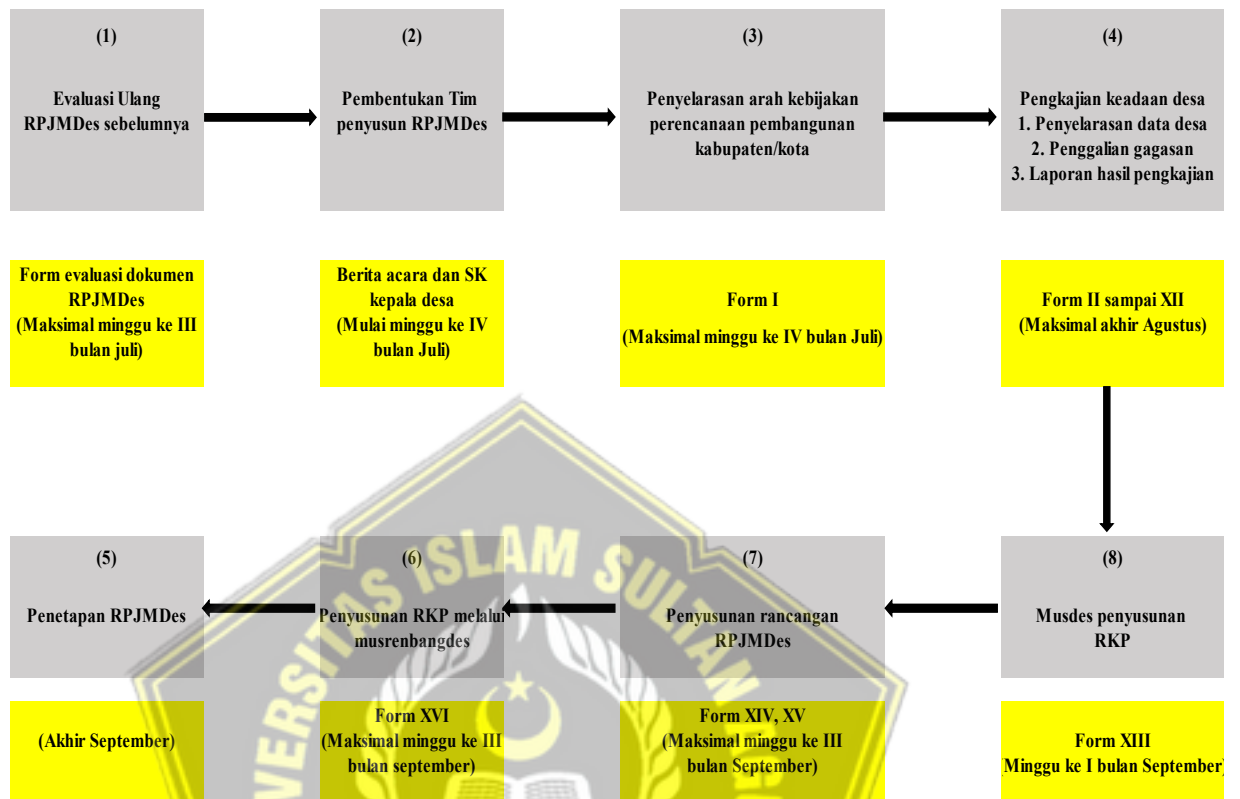
(BPKP, 2015: 35) menyatakan bahwa tertib dan disiplin anggaran merupakan proses mengelola keuangan desa yang wajib mengacu pada pedoman atau aturan yang mendukungnya.

2.4.1 Perencanaan Pembangunan Desa

Akbar, dkk (2019: 2) berpendapat bahwa tujuan pembangunan desa untuk meningkatkan pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan, termasuk pendapatan, untuk mendapatkan kehidupan yang adil, makmur dan maju.

Rencana pembangunan desa dibentuk untuk memastikan keterlibatan, keselarasan dan konsistensi antara pembuatan rencana, penganggaran, penyelenggaraan dan pemantauan. Mekanisme perencanaan menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Bagan 2. 1 Siklus perencanaan pembangunan



2.5 Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa mengartikan jika pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya untuk pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, salah satunya menggunakan cara peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kecakapan, persepsi, dan pemanfaatan sumber daya masyarakat pada semua fasilitas, prosedur, program kerja, serta pendampingan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa berdasarkan urutan prioritas.

Mardikanto dan Soebianto (2017:110) menjelaskan konsep pemberdayaan yang meliputi: Penyuluh atau fasilitator harus bekerjasama dengan masyarakat, pemberdayaan harus mendorong terciptanya kreativitas dan kemandirian dalam masyarakat, serta pemberdayaan harus mengacu pada terwujudnya kesejahteraan ekonomi masyarakat. Menurut Kartasmita dalam Mulyawan (2016) dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, secara umum terdapat tiga (3) struktur yang dapat dikaji dalam tiga (3) aspek :

1. *Enabling*, diartikan sebagai upaya dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan berkembangnya potensi masyarakat. Pemberdayaan sendiri dimaksudkan agar pembangunan sumber daya mampu memberikan insentif, membangkitkan, memotivasi kesadaran sebagai upaya untuk melaksanakan pengembangan.
2. *Empowering*, diartikan sebagai upaya penguatan potensi masing-masing masyarakat melalui berbagai strategi yang berkaitan dengan pembukuan dan partisipasi dalam berbagai peluang yang dapat meningkatkan sumber daya masyarakat
3. *Protecting*, diartikan sebagai suatu perlindungan dan upaya membela kepentingan yang lemah

2.6 Pembangunan Desa

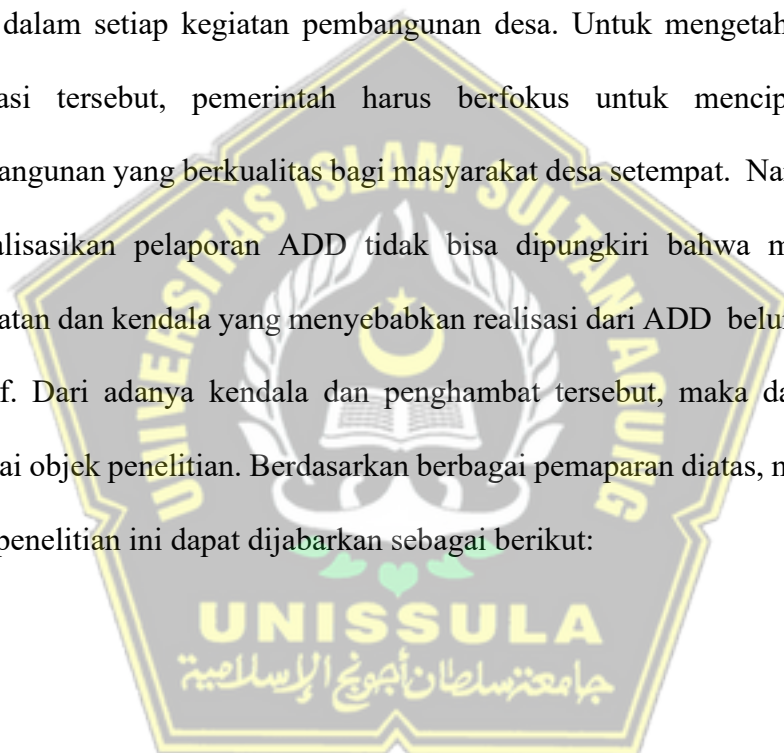
Menurut UU Nomor 6 tahun 2014, pembangunan desa bertujuan sebagai cara peningkatan kualitas dan tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah desa serta sebagai langkah pengentasan kemiskinan dengan cara berupaya memenuhi kebutuhan dasar, pembangunan infrastruktur, pengembangan potensi ekonomi

internal dan pembangunan desa, dan upaya memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Konsep pemberdayaan masyarakat itu sendiri, umumnya dipersepsikan berbeda, hal ini dikarenakan potensi yang dimiliki oleh masing-masing desa berbeda, sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Nazaruddin (2017) menyatakan bahwa sebagian besar desa pada Kota Jombang, konsep dari pemberdayaan masyarakat diwujudkan melalui Program Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat atau yang disebut P2KSBM yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan serta mempromosikan wirausaha yang dijalankan oleh para umkm. Bentuk pemberdayaan pada Desa Lontar Kabupaten Serang, realisasinya difokuskan untuk peningkatan pendapatan nelayan serta masyarakat pesisir melalui program sekaya maritim (Munandar, 2020)

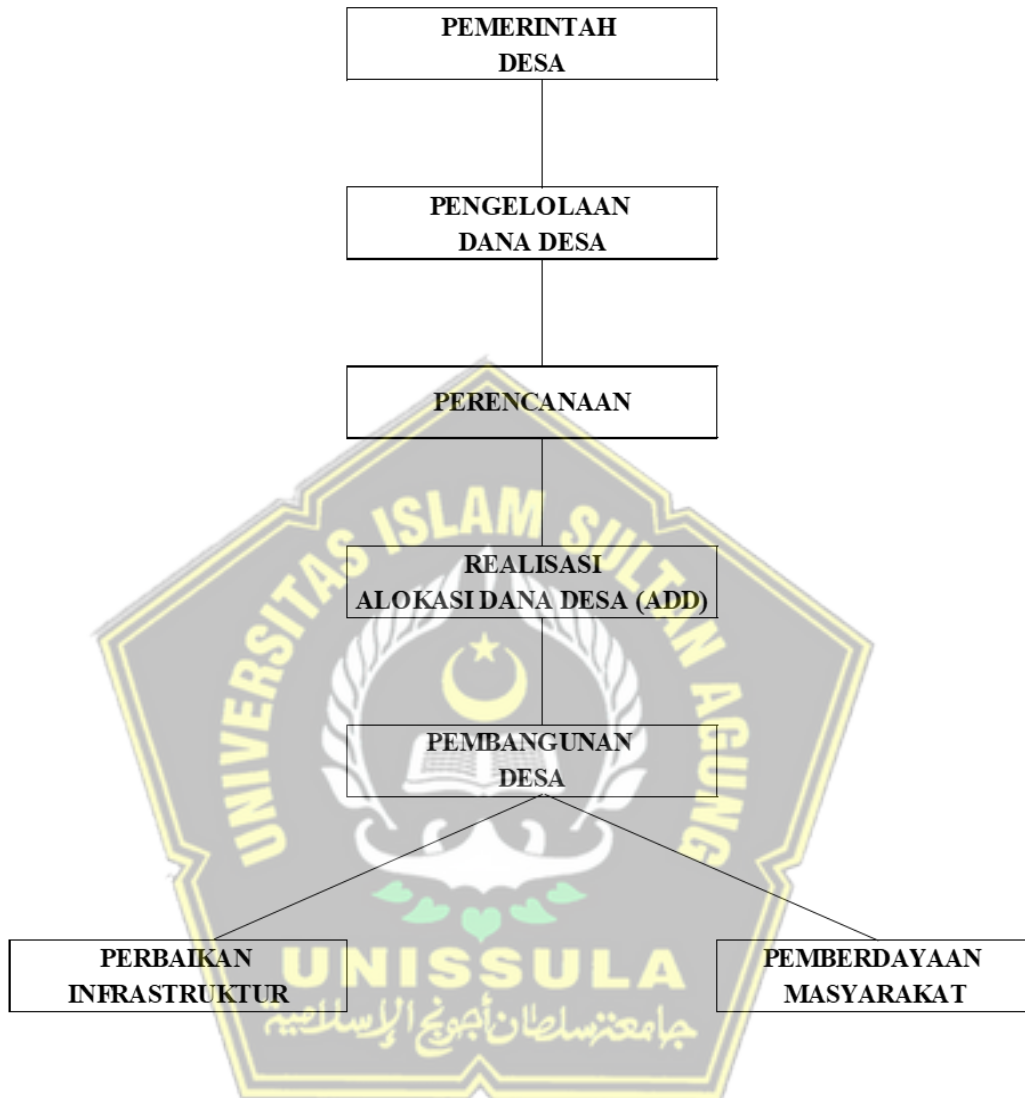
Penggunaan ADD secara efektif dan efisien, dapat dijadikan sebagai indikator pendukung bagi pembangunan desa yang nantinya dapat menjamin kesejahteraan serta mengurangi angka kemiskinan. (Rimawan, 2019). Pada Kabupaten Maluku Tengah, realisasi dari ADD dimanfaatkan untuk mengembangkan aplikasi web berbasis prototyping yang telah menghasilkan *class diagram*, *activity diagram*, *perancangan algoritma*, *sequence diagram*, *mockup pada perancangan antar muka sistem*, *entity relational data model* (Latuconsina, 2019). Pelaksanaan realisasi ADD di desa panjunan, digunakan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pkk (Bahtiar, 2019)

2.7 Kerangka Penelitian

Pada penelitian ini, akan membahas tentang analisis realisasi pelaporan ADD dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat dan perbaikan infrastruktur pada Desa Bantengmati. Sejak undang undang desa ditetapkan oleh pemerintahan pusat, desa diberikan wewenang untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri, diantaranya adalah untuk menciptakan masyarakat yang partisipatif untuk ikut andil dalam setiap kegiatan pembangunan desa. Untuk mengetahui upaya dari realisasi tersebut, pemerintah harus berfokus untuk menciptakan output pembangunan yang berkualitas bagi masyarakat desa setempat. Namun, di dalam merealisasikan pelaporan ADD tidak bisa dipungkiri bahwa masih terdapat hambatan dan kendala yang menyebabkan realisasi dari ADD belum sepenuhnya efektif. Dari adanya kendala dan penghambat tersebut, maka dapat dijadikan sebagai objek penelitian. Berdasarkan berbagai pemaparan diatas, maka kerangka pada penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:



Bagan 2. 2 Kerangka penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pada proses penelitian, penulis melakukan penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Secara umum deskriptif kualitatif didefinisikan sebagai suatu metode yang mampu memberi gambaran secara sistematis mengenai suatu permasalahan atau keadaan yang telah terjadi. Menurut Sugiyono (2017:59) deskripsi kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan, menunjukkan atau memperlihatkan keadaan sekarang dari subjek yang sedang dipelajari, yang bergantung pada keadaan dan kondisi ketika penelitian dilaksanakan. Dengan demikian, metode pendekatan dengan metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk memperoleh fakta atau bukti pendukung yang berkaitan dengan kejadian saat ini serta terfokus untuk mengaitkan antara variabel satu dengan lainnya yang dilakukan terhadap beberapa kebijakan alokasi dana desa yang berkaitan dengan realisasi pelaporan ADD untuk pembangunan desa, khususnya dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan perbaikan infrastruktur pada Desa Bantengmati, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak.

3.2 Subjek dan objek penelitian

a. Subjek penelitian

Arikunto (2016) menyatakan bahwa dalam subjek penelitian memiliki batasan berupa benda, suatu hal, tempat, manusia maupun data pada variabel

penelitian dan permasalahan yang ada. Pada penelitian ini, subjek yang digunakan penulis adalah

Tabel 3. 1 Informasi subjek penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Muhdhor	Kepala desa
2	Sulaiman	Sekretaris desa
3	Yenny Ana Tri Astuti	Bendahara desa
4	Al Ustadz	Staff siskeudes
5	Erwin Yuda Prasetya	Anggota BPD
6	Yatmina	Anggota pkk

b. Objek penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian, selain subjek faktor pendukung lainnya adalah objek penelitian. Berdasarkan Sugiyono (2017) objek penelitian didefinisikan sebagai atribut, perilaku, atau nilai yang berasal dari objek, manusia, atau aktivitas yang mempunyai pola khas yang menjadi fokus peneliti untuk dipahami sehingga dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan. Dalam penelitian kali ini, objek yang dipergunakan sebagai bahan penelitian yaitu hasil dari realisasi pelaporan ADD, rencana kerja dan output dari pemberdayaan masyarakat dan perbaikan infrastruktur pada Desa Bantengmati, Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.

3.3 Definisi Operasional

Sebagai upaya untuk mempermudah analisis data, maka diperlukan batas permasalahan yang akan dikumpulkan guna untuk dijadikan sebagai acuan untuk melakukan identifikasi sekaligus menanggapi masalah yang timbul pada saat penelitian. Pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa acuan sehingga variabel yang telah ada dapat diukur secara maksimal.

Tabel 3. 2 Definisi operasional

Variabel	Indikator
Alokasi Dana Desa (Lestari, 2018)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan realisasi ADD mengacu pada undang undang yang berlaku. 2. Pengembangan pada masing masing bidang menggunakan ADD yang telah direncanakan, dikelola, dikendalikan oleh pemerintah desa. 3. Informasi tentang penggunaan dana desa dialokasikan secara menyeluruh tanpa terkecuali 4. Pembangunan dan pengembangan desa difokuskan untuk kepentingan masyarakat desa
Pemberdayaan Masyarakat (Suharto, 2017)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan partisipasi masyarakat 2. Pemanfaatan sumber produktif desa 3. Peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat 4. Peningkatan kemampuan akses kesejahteraan
Perbaikan infrastruktur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelayakan pada akses jalan utama

(Andriyani, 2019)	<ol style="list-style-type: none"> 2. Adanya pembangunan irigasi 3. Pengadaan drainase
-------------------	--

Dengan adanya definisi operasional tersebut diharapkan analisa dapat dilakukan secara terorganisir, guna untuk memberi batasan terhadap variabel penelitian. Sehingga dengan adanya pembatasan variabel tersebut, dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan data pada saat dikumpulkan.

3.4 Data dan sumber Penelitian

3.4.1 Data

Data primer dan data sekunder merupakan dua jenis data yang digunakan dalam penelitian kali ini. Pada penggunaan dua jenis data tersebut, masing-masing memiliki perbedaan. Sugiyono (2017) menjelaskan bahwa data primer merupakan sumber data yang memberikan data secara langsung pada pengumpul data. Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari para informan. Sedangkan menurut Moleong (2012) Data sekunder diartikan sebagai data dari literatur yang tersedia, dengan demikian peneliti hanya perlu mengutip dan melakukan analisis.

a. Data Primer

Pada penelitian ini data primer didapatkan secara langsung dan bersumber dari keterangan para informan yang berkaitan langsung pada permasalahan yang sedang diteliti. Disini data yang didapatkan penulis, secara langsung masih memiliki keterkaitan terhadap realisasi pelaporan distribusi dana desa, pemberdayaan masyarakat, perbaikan infrastruktur di Desa Bantengmati,

Kecamatan Mijen Kabupaten Demak. Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa, bendahara desa, anggota PKK sebagai wakil masyarakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini merupakan data yang didapatkan dengan tidak langsung yang berasal dari sumber aslinya atau didapat dari beberapa dokumen, jurnal, penelitian terdahulu. Secara umum data sekunder yang penulis gunakan adalah berasal dari laporan realisasi, perencanaan, pertanggungjawaban ADD dan juga berasal dari laporan perbaikan infrastruktur serta dari realisasi rencana kerja pemberdayaan masyarakat pada Desa Bantengmati, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, dalam bentuk laporan keuangan Desa Bantengmati, Kecamatan Mijen Kabupaten Demak tahun 2021, Peraturan Bupati Demak Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Demak, buku petunjuk pengelolaan keuangan desa (Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa BPKP, 2015)

3.5 Metode Pengumpulan Data

Sugiyono (2016) menyatakan bahwa pengumpulan data merupakan tahapan terpenting dalam sebuah penelitian, hal ini dikarenakan penelitian memiliki tujuan utama yaitu untuk mengumpulkan data dengan benar. Sehingga, dengan minimnya pengetahuan prosedur mengenai proses data terkumpulkan, peneliti mungkin tidak menerima data yang sesuai dengan tolak ukur yang telah

disetujui. Untuk itu, penulis melakukan pengumpulan data menggunakan cara sebagai berikut:

3.5.1 Wawancara

Moleong (2014) menyatakan antara *interviewer* atau pewawancara yang memberikan pertanyaan dan sebagai *interviewee* atau yang diwawancarai mencoba memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pada penelitian ini, wawancara dilaksanakan secara tatap muka dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada pemangku kepentingan yaitu pemerintah desa Bantengmati, kabupaten Mijen, kepala menteri Demak yang berkontribusi dalam memberikan sejumlah fakta atau informasi yang berkaitan dengan realisasi dan pelaporan ADD terhadap pemberdayaan masyarakat dan perbaikan infrastruktur. Pertanyaan diberikan dalam wawancara ini berhubungan dengan penggunaan dana desa apa saja yang menjadi prioritas, bagaimana implementasinya untuk hasil pembangunan, peningkatan, pemberdayaan di Bantengmati, selain dampaknya Penulis juga akan melaksanakan wawancara kepada salah satu masyarakat tentang infrastruktur perbaikan dan pemberdayaan masyarakat.

3.5.2 Observasi

Observasi diartikan sebagai teknik mengumpulkan data yang dilaksanakan dengan mengamati atau melihat langsung suatu keadaan yang terjadi untuk mengetahui fakta atau informasi yang berkaitan dengan kebenaran suatu masalah. Pada saat melaksanakan penelitian ini, penulis memutuskan untuk menggunakan metode observasi partisipatif, dimana

pada saat penelitian berlangsung, peneliti terlibat langsung dengan subjek penelitian yang dilakukan.

3.5.3 Dokumentasi

Berdasarkan Sugiyono (2018) Dokumentasi didefinisikan sebagai sebuah cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data serta informasi berupa sebuah buku, catatan, tulisan, dokumen dan angka visual berupa laporan dan informasi yang berperan sebagai bahan pendukung penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan melihat data atau catatan yang dicatat oleh instansi pemerintah desa Bantengmati, seperti arsip Rencana Kerja Pemerintahan Desa atau program pembangunan terkait bidang pemberdayaan masyarakat dan perbaikan infrastruktur, rencana anggaran dalam pembiayaan program kerja, laporan pertanggungjawaban ADD.

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data berupa teknik analisis model interaktif. Soetopo (2005) menyatakan bahwa teknik analisis kualitatif dengan model interaktif terbagi atas tiga unsur:

a. Reduksi Data (*Data reduction*)

Reduksi data didefinisikan sebagai suatu proses melengkapi, memusatkan, menyederhanakan, mengabstraksikan data yang didapat dari data mentah yaitu data yang pertama kali dimuat sebagai catatan tertulis. Proses reduksi data dapat berlangsung terus menerus pada saat penelitian. Pada penelitian ini, minimisasi data dilakukan dengan

mengklasifikasi dan memusatkan data terkait perencanaan anggaran dan pencapaian ADD sesuai dengan variabelnya yaitu pemberdayaan masyarakat dan perbaikan infrastruktur. Hasil dari reduksi data nantinya akan disajikan kedalam sebuah bentuk tabel yang akan mempermudah penulis dalam melaksanakan pengumpulan data berikutnya.

b. Penyajian data (*Data display*)

Penyajian data sebagai rangkuman informasi disusun dalam bentuk naratif memungkinkan ditariknya kesimpulan dari temuan penelitian. Selain format naratif, data disajikan dalam berbagai format seperti matriks, gambar, grafik, variabel aktif, dan tabel. Pada dasarnya, penyajian data pada penelitian ini berisikan deskripsi data yang diperoleh dan memperkecil variabel. Penyajian data dilakukan dengan deskripsi data yang telah direduksi yang terdiri dari rencana penggunaan serta realisasi ADD untuk pembangunan desa, yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan perbaikan infrastruktur. Sehingga dengan adanya penyajian data, penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan mudah.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*Conclusion drawing/verification*)

Inti dari sebuah kegiatan penelitian adalah menarik kesimpulan, secara umum penarikan kesimpulan merupakan suatu aktivitas yang dilaksanakan oleh para peneliti yang diperlukan dalam rangka melakukan verifikasi, yaitu suatu proses pengulangan dimulai dari tahap

pengumpulan data, kemudian dijabarkan lebih rinci setelah data tersedia. Penyajian penarikan kesimpulan pada penelitian ini diuraikan melalui deskripsi dalam sebuah kalimat maupun bentuk data angka, dimana data tersebut sudah di organisir sesuai dengan variabelnya yaitu terkait dengan rencana penggunaan ADD dan realisasinya terhadap pemberdayaan masyarakat dan perbaikan infrastruktur. Dengan adanya penarikan kesimpulan, maka dapat mempermudah untuk memahami inti dari penelitian ini.



BAB IV HASIL PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran umum pemerintahan desa

4.1.1 Sejarah singkat pemerintah Desa Bantengmati

Pemerintahan Desa Bantengmati, terletak Pada Kecamatan Mijen Kabupaten Demak tepatnya di Desa Bantengmati. Desa Bantengmati secara umum berjarak sekitar 8 km dari Kecamatan Mijen yang terdiri dari 2 dusun yaitu Bantengmati dan Gebang Sewu. Secara keseluruhan terdapat 4 RW dan 23 RT dari dua dusun tersebut. Jumlah penduduk Desa Bantengmati sekitar 3.961 jiwa. Secara geografis batas-batas untuk wilayah Desa Bntengmati adalah sebagai berikut:

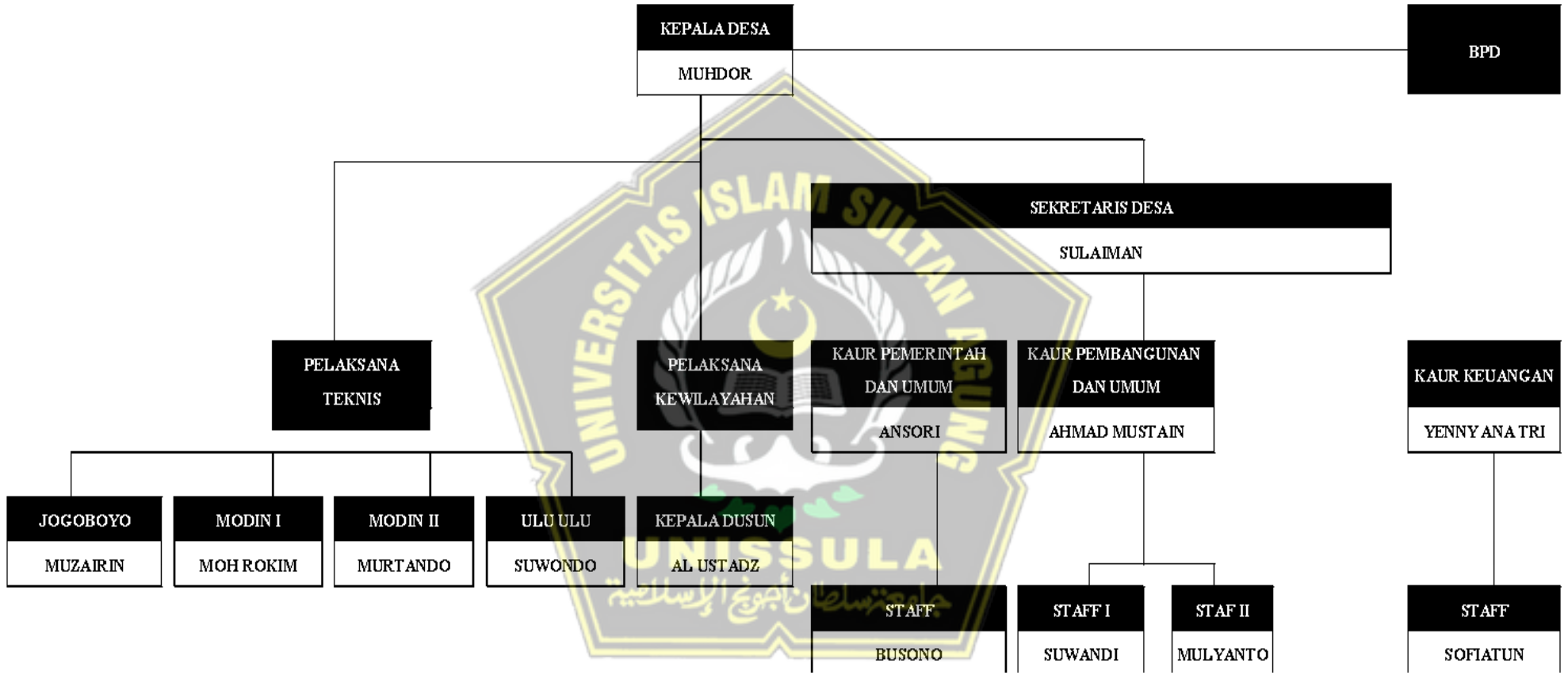
Tabel 4. 1 Batas wilayah Desa Bantengmati

Sebelah utara	Desa Mijen
Sebelah timur	Desa Mlaten
Sebelah selatan	Desa Mulyorejo
Sebelah barat	Desa Turirejo/ Ngelo Kulon

4.1.2 Visi misi

Dalam menjalankan pemerintahannya sendiri, tentunya desa memiliki visi misi tersendiri dalam upaya untuk mewujudkan taraf perbaikan dalam berbagai bidang yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya. Adapun visi misi yang terdapat pada Desa Bantengmati adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 4. 1 Struktur organisasi Pemerintah Desa Bantengmati

4.1.5 Bentuk dan pelayanan birokrasi/administrasi Desa Bantengmati

Untuk menyempurnakan sistem pengelolaan pemerintahan desa, perlu adanya penataan administrasi agar sistem birokrasi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Proses untuk penataan pemerintahan desa itu meliputi pendataan informasi dan data yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya kegiatan pemerintahan desa. Oleh karenanya, pemerintah desa sebagai pelayanan birokrasi harus melakukan pembenahan dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Ada beberapa bentuk administrasi pemerintahan desa, yaitu:

1. Administrasi umum

Kegiatan yang dilaksanakan pada administrasi umum meliputi aspek kegiatan pencatatan. Pada kegiatan pencatatan ini, pemerintah desa melakukan pendataan informasi dan data kegiatan pemerintah desa kedalam buku manajemen umum pada lembaga desa.

2. Pengelolaan penduduk atau administrasi kependudukan

Administrasi kependudukan adalah suatu bentuk aktivitas pendataan informasi dan data para penduduk yang dilakukan pada buku pengelolaan kependudukan pemerintahan desa.

3. Manajemen pembangunan atau administrasi pembangunan

Administrasi pembangunan merupakan sebuah kegiatan mencatat informasi dan data terkait dengan rencana maupun realisasi kedalam buku administrasi

pembangunan desa. Adapun jenis-jenis serta bentuk suatu administrasi atau birokrasi pada tingkat desa antara lain:

a. Surat pengantar pembuatan KTP

Pemerintah desa membuat surat pengantar untuk pembuatan KTP sebagai bagian dari birokrasi di tingkat desa. Jadi, bagi masyarakat yang berkeinginan untuk membuat KTP di kantor kecamatan harus mendapatkan surat pengantar dari desa.

b. Surat keterangan lahir

Salah satu pelayanan pada instansi pemerintahan desa ialah melakukan pengurusan akte lahir. Dimana untuk mmebuat akte kelahiran pada kecamatan harus membawa surat pengantar dari desa guna untuk ditindaklanjuti.

c. Perubahan data keluarga

Pemerintah desa memberikan layanan administrasi dan/birokrasi berupa pemberian surat pengantar kepada warga setempat terkait dengan perubahan data keluarga.

d. Pengurusan surat kematian

Sangat penting untuk menjaga surat (akta) kematian, hal ini untuk menghindari data tentang almarhum digunakan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki tanggung jawab. Bagi pemerintah desa, pengelolaan ini dilakukan, guna menjamin keakuratan keterangan dan data mengenai warga yang

berpeluang menjadi pemilih dalam pemilihan kepala daerah atau pemilihan umum.

e. APBDesa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APBDesa adalah perencanaan keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan dan dibahas bersama kepala desa bersama BPD melalui peraturan desa. Secara umum anggaran desa merupakan dokumen yang memuat ketentuan hukum yang menjamin kepastian rencana pelaksanaan kegiatan yang terikat pada perangkat desa dan pemerintah.

f. Jaringan aspirasi rakyat

BPD merupakan lembaga yang menunjukkan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD disini berfungsi untuk menetapkan segala kesepakatan desa dengan kepala desa sekaligus sebagai penyalur dan merespon keinginan masyarakat.

g. Laporan pemerintah

Pelaporan kepada pemerintah merupakan suatu bentuk pelayanan desa, agar masyarakat dapat melakukan refleksi atas pengaduan dan aspirasi terkait kinerja pemerintah desa. Laporan pemerintah dapat dilakukan dengan cara masyarakat melapor langsung ke badan pendamping desa.

4.2 Hasil pengamatan

Desa Bantengmati merupakan desa berkembang di Kecamatan Mijen Kabupaten Demak. Secara umum pembagian ADD yang dibagikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada desa disesuaikan dengan kategori desa pada saat ini. Pada dasarnya pemerintah daerah menyalurkan pendistribusian dana desa ke dalam APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) pada setiap tahun anggaran periode berjalan, paling sedikit adalah sebesar 10% dari dana perimbangan yang diterima daerah dalam APBDes setelah dikurangi oleh Dana Alokasi Khusus (DAK). Mekanisme pada saat melaksanakan rencana anggaran alokasi dana desa realisasinya mengacu pada ketentuan penyusunan APBDes disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya alokasi dana desa dianggarkan melalui dokumen pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (DPA-BPKAD) Kabupaten Demak. Sebagai upaya dalam mewujudkan perbaikan infrastruktur dan sumber daya manusia, pemerintah desa Bantengmati merealisasikan pembangunan desa melalui pemanfaatan alokasi dana desa yang telah ditetapkan melalui Rencana Kerja Desa (RKD). Rencana Kerja pemerintahan tersebut digunakan sebagai acuan untuk merealisasikan alokasi dana desa secara tepat sasaran terhadap bidang pembangunan infrastruktur dan juga bidang pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan dari ADD sebagian besar telah direalisasikan oleh pemerintah desa, pada pelaksanaan pendistribusian dana desa umumnya sudah sesuai dengan asas asas yang berlaku, yaitu asas transparansi, akuntabilitas, tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Insentif dari alokasi dana desa dimanfaatkan untuk biaya

pemeliharaan operasional dan aparatur desa, serta untuk biaya pemberdayaan masyarakat pada Desa Bantengmati.

4.2.1 Perencanaan pengelolaan dana desa

Sebagaimana tertuang dalam Permendagri Tahun 2014 Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa disebutkan bahwa untuk melaksanakan kebijakan pembangunan dengan menggunakan dana desa biasanya kebijakan tersebut dirumuskan dalam suatu rencana. Dalam menyusun rencana penggunaan dana desa, pemerintah desa Bantengmati mengadakan musrenbangdes. Musrenbangdes dilakukan sebagai langkah awal untuk melakukan musyawarah perencanaan dana desa, dengan melibatkan unsur lembaga desa meliputi, BPD, perangkat desa, RT, RW, tokoh masyarakat yang dihadiri dari dua dusun yaitu Bantengmati dan gebangsewu, tokoh agama, dan perwakilan anggota PKK. Tujuan dari diadakannya musyawarah desa adalah untuk mengaspirasikan gagasan yang bertujuan agar dibahas dan disetujui bersama. Berdasarkan aspirasi gagasan tersebut, selanjutnya dapat diketahui adanya masalah yang terjadi, kebutuhan serta keperluan apa saja yang harus diprioritaskan. Sehingga dengan diadakannya musyawarah tingkat desa, seluruh aspirasi dari masyarakat dapat tertampung dengan baik.

Pemerintah desa Bantengmati selaku tim penyusun bersama BPD berperan aktif dalam membahas sekaligus menyepakati rencana pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat yang akan direncanakan. Dalam rangka untuk menyepakati rencana

pembangunan desa, pemerintah desa Bantengmati memiliki skala prioritas yaitu dengan mengedepankan hal hal yang bersifat mendesak dan harus dilakukan segera.

Berkaitan dengan penetapan prioritas ADD, penulis melakukan wawancara terhadap beberapa aparatur desa. Salah satunya adalah Bapak Muhdor selaku Kepala Desa Bantengmati, beliau menyatakan bahwa:

“Dalam hal perencanaan kami selalu melibatkan semua unsur masyarakat didalamnya yaitu dengan melalui musrenbangdes, dengan dihadiri perangkat desa, BPD, RT, RW, tokoh masyarakat, PKK, keluarga miskin.”

Pernyataan lain juga peneliti dapatkan dari Bapak Sulaiman selaku sekretaris Desa Bantengmati, beliau menyatakan:

“Dengan melalui musrenbangdes tersebut, masyarakat bisa untuk berperan aktif untuk mengaspirasikan pendapat mereka, dan kami selalu menampung aspirasi dari para warga desa. Jadi untuk musrenbangdes itu, kita membahas rencana anggaran, pemaparan APBDes dan penerapannya juga”

Untuk mengetahui adanya keterlibatan dari masyarakat dalam pengelolaan ADD, penulis juga melakukan wawancara kepada ibu Yenny selaku bendahara desa, beliau menyatakan bahwa:

“Masyarakat desa sangat paham sekali tentang prioritas penggunaan dana desa yang akan direalisasikan, karena dalam penyusunan rencana pembangunan desa mereka sudah dilibatkan.”

Pendapat serupa juga penulis peroleh dari Bapak Erwin Yuda selaku anggota BPD, beliau menyatakan:

“Jadi, untuk partisipasi dari masyarakat itu tidak semuanya bisa hadir di musrenbangdes. Untuk itu, diambil kebijakan dengan cara ketua Rt/Rw menampung aspirasi dari warga sekitar untuk disampaikan di musrenbangdes.”

Namun didalam pelaksanaan perencanaannya seringkali mengalami revisi atau perubahan tentang anggarannya, Bapak Al-Ustadz selaku staff siskeudes menyatakan:

“Sebelum anggaran kita laporkan ke dalam sistem, biasanya sering mengalami perubahan anggaran. Nah, perubahan ini dikarenakan harga material atau bahan bahan mengalami kenaikan”

Dari pernyataan yang telah dipaparkan diatas, dapat diketahui bahwa dalam dalam melakukan perencanaan anggaran dimulai dari musrenbangdes guna untuk mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Dapat diartikan bahwa Pemerintah Desa Bantengmati dalam perencanaan penggunaan anggaran sudah sesuai peraturan yang digunakan terkait dengan ketentuan dalam menyusun rencana penggunaan keuangan. Dalam penyusunan anggaran tersebut, secara umum pemerintah desa sudah melibatkan masyarakat untuk ikut serta dalam mengaspirasikan pendapatnya, dimana dalam mengaspirasikan pendapatnya tersebut ketua RT, RW, terlebih dahulu menampung beberapa aspirasi yang disampaikan oleh warga setempat. Setelah aspirasi tersebut ditampung dan disaring, selanjutnya disampaikan melalui musrenbangdes untuk dibahas bersama.

Berkaitan dengan RPJM Desa Bantengmati (Rencana Pembangunan Desa) untuk enam tahun kedepan, pemerintahan desa telah merancang misi pembangunan. Maksud dari misi tersebut digunakan untuk mempermudah pemerintah desa saat menetapkan skala prioritas pembagian alokasi dana desa. Bidang pembangunan tersebut meliputi, bidang sosial, bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang sarana prasarana.

4.2.2 Prioritas penggunaan dana desa

Pada saat penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Desa Bantengmati (RKP Desa) penggunaan anggarannya di alokasikan sesuai dengan priotitas yang sudah ditetapkan diantaranya untuk kebutuhan pembangunan, perbaikan dan pemberdayaan masyarakat. Maka, Pemerintah Desa Bantengmati dapat menyusun rencana penggunaan dana desa yang akan dialokasikan ke beberapa bidang yaitu sebagai berikut :

1. Bidang pembangunan

Perbaikan dan pembangunan infrastruktur desa, memang menjadi fokus utama pada rencana kerja Pemerintah Desa Bantengmati. Hal ini dikarenakan, kelayakan dari bidang infrastruktur sangat berpengaruh pada kemajuan sumber daya manusia. Seperti yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa Bantengmati untuk enam tahun kedepan adalah hendak merealisasikan perbaikan pada bidang pembangunan dan pemberdayaan.

Mengacu pada kesepakatan dalam musrenbangdes, pemerintah desa kemudian mengalokasikan dana desa nya untuk bidang pembangunan. Dapat dilihat, rencana penggunaan dana desa pada bidang pembangunan dikembangkan ke dalam empat sub bidang diantaranya, sub bidang pendidikan, sub bidang kesehatan, sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sub bidang kawasan serta permukiman. Dimana pada masing masing sub bidang tersebut memiliki memiliki tujuan untuk pembangunan. Maka, nilai anggaran untuk realisasi dibagi kedalam 3 tahap.

Hasil wawancara yang peneliti peroleh dari Bapak Muhdor selaku Kepala Desa Bantengmati menyatakan bahwa:

“Untuk saat ini realisasi pada perbaikan infrastruktur sudah maksimal, namun ada beberapa infrastruktur yang belum maksimal, untuk bidang perbaikan infrastruktur kita fokuskan ke pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan”

Berkaitan dengan program PKT pada Desa Bantengmati, Bapak Erwin Yuda selaku anggota BPD menyatakan:

“Dalam bidang pembangunan tersebut fokusnya memang ke PKT saluran irigasi, karena mayoritas penduduk disini kan bekerja sebagai petani. Apalagi untuk menanam bawang itu membutuhkan irigasi yang baik”

Pernyataan lain juga diberikan oleh Bapak muhdor selaku Kepala Desa Bantengmati, beliau menyatakan bahwa:

“Pemerintah Desa Bantengmati tidak hanya berfokus pada perbaikan infrastruktur umum saja, tapi kami juga ikut serta dalam perbaikan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni).”

Untuk merealisasikan rencana pembangunan tersebut, maka pemerintah desa membuat rencana anggaran yang dibagi kedalam 3 tahap, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Rencana pembangunan tahap I

Uraian kegiatan	Lokasi	Anggaran	Tahap
Pembangunan & perbaikan jalan menggunakan beton	Depan Sartak	Rp. 150.000.000	I
	Tugak/Komplang	Rp. 109.119.000	I
	Karangsono Barat	Rp. 114.000.000	I
	Blok Kudo	Rp. 30.000.000	I

Sumber: RAB Desa Bantengmati, 2021

Tabel 4. 3 Rencana pembangunan tahap II

Uraian Kegiatan	Lokasi	Anggaran	Tahap
Perbaikan dan pembangunan Jembatan	Luwak/Tunggak	Rp. 90.000.000	II
	Kali Toyeb	Rp. 60.000.000	II
	Karangsono Timur	Rp. 73.000.000	II
Operasional madin	Bantengmati dan Gebangsewu	Rp. 45.000.000	II

Sumber: RAB Desa Bantengmati, 2021

Tabel 4. 4 Rencana pembangunan tahap III

Uraian kegiatan	Anggaran	Tahap
Pembangunan drainase saluran	Rp. 66.188.000	III
Blok kudo	Rp. 89.417.400	III
Penambahan infrastruktur posyandu	Rp. 3.913.000	III
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rp. 45.000.000	III

Sumber: RAB Desa Bantengmati, 2021

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui untuk tiap-tiap tahap mempunyai prioritas tersendiri. Untuk tahap I anggarannya sebesar Rp. 403.119.000 yang difokuskan untuk perbaikan dan pembangunan jalan desa yang berfungsi sebagai akses utama. Tahap ke II sebesar Rp. 269.000.000, anggaran tersebut dimaksimalkan untuk perbaikan dan pembangunan jembatan serta untuk biaya operasional madin. Tahap ke III sebesar Rp. 204.518.400, dimana pemerintah desa menggunakan anggaran tersebut untuk Irigasi, perbaikan infrastruktur dan fasilitas desa, serta untuk program RTLH.

2. Bidang pemberdayaan masyarakat

Sebagai upaya dalam mengurangi kesenjangan sosial pada lingkungan masyarakat, pemerintah desa mengalokasikan dana desanya pada bidang pemberdayaan masyarakat. Dan dalam bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa bersama dengan masyarakat bersama-sama untuk merealisasikan pembangunan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya nyata untuk

merealisasikan program tersebut, Pemerintah Desa Bantengmati memiliki skala prioritas sendiri dalam rencana pembangunannya. Dalam perencanaan penggunaan dana desa yang telah dibahas bersama masyarakat, pemerintah desa dan masyarakat desa sepakat untuk mengalokasikan dana desa tersebut untuk bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga.

Berdasarkan wawancara yang telah penulis peroleh dari Bapak sulaiman sebagai sekretaris desa Bantengmati, terkait dengan pemberdayaan masyarakat beliau menyatakan:

“Jadi begini, pada SDGS Desa kan sudah ditetapkan, untuk prioritas penggunaan dana desa sendiri itu salah satunya memang untuk pemberdayaan masyarakat. jadi kami memiliki beberapa kegiatan pada pemberdayaan masyarakat ini. Seperti contohnya ada pelatihan kader stunting, pelatihan pembuatan bawang goreng, dan juga pelatihan sablon. kebetulan untuk alat sablon sudah ada fasilitas dari desa”

Berkaitan dengan bidang kesehatan, penulis melakukan wawancara terhadap Bapak Erwin Yuda, beliau menyatakan bahwa :

“Untuk bidang kesehatan sendiri, dari pemerintah desa sudah memiliki polindes dan ada bidan desa juga”

Penuturan serupa juga penulis dapatkan dari wawancara terhadap Ibu Yatimia, selaku anggota PKK menyatakan

“PKK disini juga ikut membantu di bidang kesehatan, contohnya seperti adanya operasional Ibu hamil. Untuk fasilitasnya sendiri itu ada matras, snack, timbangan, pemeriksaan rutin, senam yang diadakan 1 bulan sekali”

Dari pernyataan yang telah didapatkan dari wawancara terhadap beberapa narasumber, dapat diketahui bahwa dalam bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan kesejahteraan demi meningkatkan kualitas dan mengurangi kesenjangan. Sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, Pemerintah Desa Bantengmati telah mengoptimalkan penggunaan dana desa dengan tepat sasaran. Upaya peningkatan kemandirian dan pengembangan untuk sumber daya manusia, dibuktikan dengan adanya fasilitas yang diberikan oleh desa kepada masyarakat seperti, tersedianya alat sablon. untuk itu dalam perencanaan penggunaan dana desanya pemerintah desa mengalokasikan kedalam beberapa kegiatan, yaitu sebagai berikut :

Tabel 4. 5 Rencana pemberdayaan masyarakat

Bidang Pemberdayaan masyarakat	Jumlah penerima	Nominal	Tahap
Pemberian bantuan kepada lansia	4 Orang	Rp. 5.280.000	Tahap II
Pelatihan guru PAUD	1 Orang	Rp. 3.500.000	Tahap III
Peningkatan Skd	-	Rp. 1.000.000	Tahap I
Operasional karang taruna		Rp. 2.500.000	Tahap II

Sumber : RAB Desa Bantengmati, 2021

Dapat dilihat dalam tabel 4.5 menyatakan bahwa untuk sasaran pemberdayaan tidak hanya mencakup masyarakat saja namun juga ikut melibatkan tenaga pendidik dan juga aparatur desa. Hal ini berarti dalam usaha meningkatkan kualitas SDM,

Pemerintah Desa Bantengmati memiliki keinginan yang kuat untuk mengurangi adanya ketimpangan sosial dan memanfaatkan ADD secara tepat sasaran. Dalam rencana penggunaan ADD untuk pemberdayaan masyarakat, sasaran utamanya adalah terhadap kualitas aparatur desa, dalam rencana realisasinya pada tahap I, akan direalisasikan untuk peningkatan skd. Artinya, dengan adanya pelatihan skd bagi aparatur desa, diharapkan output kinerja yang dihasilkan dapat berkualitas karena didalam mengelola keuangan desa dibutuhkan seorang aparatur yang handal agar penggunaan dari keuangan desa tidak salah sasaran. Untuk tahap ke II dan III rencana realisasinya adalah untuk memberi insentif kepada lansia dan juga operasional karang taruna serta pelatihan karang taruna. Dari ketiga rencana realisasi tersebut, proporsi pembangian ADD nya dapat dikatakan seimbang.

4.2.3 Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa

Pada perencanaan keuangan desa yang telah tersusun oleh pemerintah desa, realisasi dari rencana anggaran tersebut merupakan salah satu bagian dari bentuk pertanggungjawaban. Dalam melaksanakan program kerja yang berhubungan dengan prioritas penggunaan pendistribusian dana desa, pemerintah desa harus merealisasikan dana tersebut sesuai dengan tepat sasaran, agar tujuan dari pembangunan dapat tercapai. Berkaitan dengan realisasi tersebut, tujuan dari pembangunan pada Desa Bantengmati adalah sebagai berikut:

1. Untuk pembangunan desa yang lebih baik
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

3. Memperbaiki sarana dan prasarana
4. Mengembangkan potensi dan kemandirian masyarakat desa
5. Meningkatkan kualitas infrastruktur desa

Menurut hasil wawancara yang penulis peroleh dari Bapak Al-Ustadz selaku staff siskeudes menyatakan bahwa:

“untuk kegiatan realisasi dari dana desa itu secara keseluruhan harus dilaporkan, melalui laporan ini dapat diketahui bahwa dana desa benar benar sudah direalisasikan, sistem pelaporan realisasi dana desa itu diawali dari kepala desa, kemudian baru ke bupati melalui camat, setelah itu kami melaporkan ke aplikasi desa atau siskeudes, dan desa waskita. Yang dilaporkan melalui dua metode, yang pertama substantif. Substantif itu pelaporannya melalui musyawarah antara pemerintah desa bersama mitra kerja setiap 3 sampai 4 bulan sekali, yang kedua normatif. Seperti yang sudah saya sebutkan diawal tadi melalui kepala desa, bupati, camat, dan aplikasi.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa di dalam kegiatan realisasi rencana pembangunan, pemerintah desa telah menjalankan akuntabilitasnya sebagai aparatur desa. Dapat diartikan, untuk akuntabilitasnya sudah diimplementasikan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Imbas dari realisasi pemberdayaan tersebut, output nyata sudah dapat dirasakan oleh sejumlah masyarakat desa. Dengan adanya program pemberdayaan tersebut, kesejahteraan masyarakat Desa Bantengmati dikatakan sudah terjamin. Berikut adalah laporan realisasi ADD pada Bantengmati yang telah dilaporkan pada siskeudes.

Tabel 4. 6 Realisasi ADD Bidang Pembangunan

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
Sub bidang pendidikan	Rp. 10.280.000	Rp. 10.280.000	Rp. 10.280.000
Operasional PAUD/TK/TPA/TKA/ TPQ/Madrasah non formal	Rp. 10.280.000	Rp. 10.280.000	Rp. 10.280.000
Sub bidang Kesehatan	Rp. 161.200.000	Rp. 161.200.000	Rp. 161.200.000
Penyelenggaraan posyandu (makan, kelas ibu hamil)	Rp. 4.913.000	Rp. 4.913.000	0,00
Penyelenggaraan sosialisasi covid19	Rp. 15.200.000	Rp. 15.200.000	0,00
Penyelenggaraan kegiatan ppkm	Rp. 141.087.000	Rp. 141.087.000	0,00
Belanja jasa honorarium/insentif pelayanan desa	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	0,00

Belanja modal pengadaan peralatan, mesin dan alat berat	Rp. 3.913.000	Rp. 3.913.000	0,00
Bidang pekerjaan/ perbaikan	Rp. 782.307.000	Rp. 782.307.000	0,00
Sub bidang pekerjaan	Rp. 782.307.000	Rp. 782.307.000	0,00
Penyelenggaraan perbaikan Drainase	Rp. 66.188.000	Rp. 66.188.000	0,00
Penyelenggaraan pembangunan jalan	Rp. 403.119.000	Rp. 403.119.000	0,00
Penyelenggaraan pembangunan Jembatan	Rp. 223.000.000	Rp. 268.000.000	0,00
Penyelenggaraan operasional madin	Rp. 45.000.000	Rp. 7.691.000	Rp. 32.309.000
Penyelenggaraan Perbaikan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Rp. 45.000.000	Rp. 35.000.000	Rp. 10.000.000

Sumber : Laporan Realisasi ADD Bantengmati, 2021

Tabel 4. 7 Realisasi ADD Bidang Pemberdayaan

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/kurang (Rp)
Bidang pemberdayaan masyarakat	Rp. 9.840.000	Rp. 2.500.000	0,00
Sub. Bidang kepemudaan dan olahraga	Rp. 1.060.000	Rp. 2.500.000	0,00
Pembinaan karang taruna/club kepemudaan	Rp. 1.060.000	Rp. 1.060.000	0,00
Sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga	Rp. 8.780.000	Rp. 8.780.000	0,00
Pemberian santunan kepada lansia	Rp. 5.280.000	Rp. 5.280.000	0,00
Pelatihan guru PAUD	Rp. 3.500.000	Rp. 3.500.000	0,00

Sumber : Laporan realisasi ADD Bantengmati, 2021

Berdasarkan data realisasi penggunaan dana desa tersebut pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa terdapat beberapa bidang yang belum direalisasikan diantaranya perbaikan operasional pada madin dan RTLH. Ditinjau, dari rencana kerja pemerintahan, rencana anggaran tersebut hanya berlaku untuk satu tahun anggaran. Artinya, pemerintah desa harus mempercepat pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat, untuk memaksimalkan anggaran desa guna menghasilkan output yang berkualitas.

4.2.4 Hambatan dan permasalahan umum pelaksanaan dana desa

Dalam upaya untuk merealisasikan ADD secara tepat sasaran, pemerintah desa memiliki hambatan sekaligus permasalahan, terutama pada sumber daya manusia. Secara umum pelaksanaan realisasi dana desa akan berjalan lancar jika pemerintah desa dan seluruh lapisan masyarakat dapat bekerja sama untuk perbaikan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.

Dari wawancara yang telah penulis dapat kan dari Bapak sulaiman selaku Kepala Desa Bantengmati, menyatakan:

“Kalau untuk bidang perbaikan infrastruktur itu sudah dianggarkan dengan maksimal, tapi ada juga beberapa infrastruktur yang belum tersentuh. Sama hal nya dengan pemberdayaan masyarakat, kita juga sudah mengoptimalkan penggunaannya, kita juga sudah memberikan fasilitas seperti peralatan sablon itu. Namun hasilnya minus, dan akhirnya peralatan itu tidak terpakai”

Pernyataan lain juga penulis dapatkan dari Bapak Al-Ustadz selaku staff siskeudes, beliau menyatakan:

“Realisasi di bidang infrastruktur itu bisa dibilang gampang gampang susah, dari pemerintah desa kan kebetulan sudah ada perencanaan. tapi kadang ada kendala dalam perealisasiannya, kendalanya itu kita susah mencari tenaga kerja ahli, terus

biasanya juga harga material berubah jadi lumayan menyusahkan untuk mengubah data datanya”

Dari adanya wawancara tersebut dapat diketahui, bahwa didalam perealisasiannya terdapat hambatan. Berikut adalah beberapa hambatan dan permasalahan yang penulis temukan pada Desa Bantengmati :

1. Bidang infrastruktur

- a. Sulit mencari tenaga ahli pada bidang restrukturisasi pembangunan infrastruktur
- b. lokasi pembangun belum dilaksanakan dengan rata sehingga dapat mengakibatkan kecemburuan sosial
- c. pembangunan yang kurang dioptimalkan, dikarenakan ada beberapa pembangunan yang belum direalisasikan
- d. pengelolaan dana desa tidak stabil, sehingga kurang optimal
- e. Saluran irigasi yang belum tertata dengan baik

2. Bidang pemberdayaan masyarakat

- a. Pengetahuan, keterampilan, pengalaman, yang dimiliki oleh masyarakat belum optimal dan termasuk dalam kategori kurang.
- b. Pada bidang kesehatan, pemanfaatan posyandu belum sepenuhnya di optimalkan
- c. Kurangnya kemandirian pada kader, yang bersifat terus bergantung.

- d. Masyarakat desa tidak bisa memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan desa
- e. Kemandirian dari masyarakat belum terlihat outputnya.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Prioritas penggunaan ADD

Prioritas penggunaan alokasi dana desa pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada Desa Bantengmati, secara umum sudah direncanakan dengan baik. Secara keseluruhan, untuk prioritas penetapan alokasi dana desa-nya sudah dianggarkan dengan bijak, terarah, tepat sasaran, dan disesuaikan dengan skala prioritas ataupun keadaan mendesak pada saat ini. Prioritas dari penggunaan alokasi dana desa tersebut, mendapat respon positif dari masyarakat yang hadir dalam musrenbangdes tersebut.

Dalam merealisasikan prioritas-prioritas yang sudah disusun dalam rencana kerja, pemerintah desa mengimplementasikannya secara terstruktur. Penetapan prioritas ADD tersebut, dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup serta mengurangi adanya kesenjangan. Dari data rencana pembangunan desa serta realisasinya penggunaan ADD, dapat diketahui bahwa prioritasnya sebagian besar digunakan untuk:

1. Membiayai perbaikan infrastruktur untuk fasilitas umum, terutama untuk jembatan dan jalan. Pada tahap I fokus pembangunan dan perbaikan difokuskan untuk jalan utama dan penghubung desa. Anggaran yang

dialokasikan pada tahap I adalah Rp. 403.119.000. dari dana tersebut. Sedangkan alokasi sebesar Rp. 223.000.000 digunakan untuk perbaikan dan pembangunan jembatan. Anggaran tersebut direalisasikan pada tahap ke II yaitu pada wilayah luwak/tunggak, kali toyeb, dan karangsono timur. selain itu, ADD juga dialokasikan untuk operasional madin pada 2 dusun yaitu Bantengmati dan Gebang Sewu. Perbaikan operasional pada madin di realiasikan pada tahap II bersamaan dengan pembangunan dan perbaikan jembatan. Untuk operasional madin, biaya yang dianggarkan adalah senilai Rp. 45.000.000 untuk 2 dusun. Jadi masing masing dari dusun menerima insentif sebesar Rp. 22.500.000. dari data data tersebut, diketahui bahwa proporsi anggaran tertinggi adalah untuk perbaikan jalan sebagai akses utama. propo

2. Pembiayaan terhadap program pemberdayaan masyarakat

Sebagai wujud untuk merealisasikan kesejahteraan masyarakat desa, Pemerintah Desa Bantengmati menggunakan sebagaian dananya untuk membiayai program program yang berhubungan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia diantaranya, pemberian bantuan kepada lansia, pelatihan guru paud, peningkatan skd terhadap aparatur desa, serta operasional karang taruna. Dari tabel 4.4 dapat dilihat, bahwa insentif terbesar dialokasikan untuk memberi bantuan kepada lansia yang dianggarkan sebesar Rp. 5.280.000 dan akan direalisasikan pada tahap ke II. Bantuan yang diberikan tersebut adalah

berupa sembilan bahan pokok, yang dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan dalam masyarakat. kemudian, untuk pelatihan terhadap guru paud adalah sebagai tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang pendidikan serta untuk meningkatkan *softskill*. Anggaran sebesar Rp. 3.500.000 digunakan untuk 12 kali pelatihan dalam satu tahun, sementara anggaran untuk peningkatan skd adalah Rp. 1.000.000 yang ditujukkam untuk aparaturnya, bentuk pelatihannya adalah berupa pemberian materi maupun praktik tentang komputer serta pemahaman mengenai keuangan desa. Pelatihan tersebut diadakan setiap satu bulan sekali dalam 12 bulan. Untuk operasional karang taruna, insentif tersebut digunakan untuk pembelian.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa proporsi ADD tertinggi adalah digunakan untuk perbaikan infrastturktur terhadap fasilitas umum maupun masyarakat. Dalam mengalokasikan anggaran dengan proposi nilai yang tinggi, pemeirntah desa menggunakan RPJMDes sebagai acuan dengan memperhatikan kondisi fisik sarana prasana serta kebutuhan mendesak pada Bantengmati.

4.3.2 Realisasi Pelaporan alokasi dana desa

Sebagai upaya dalam menjalankan akuntabilitasnya sebagai aparaturnya yang baik, pemerintahan desa telah merealisasikan satu persatu, rencana pembangunan secara berkesinambungan. Dalam realisasi tersebut, pemerintah desa merasa belum mampu untuk mengoptimalkan pembangunan dan perbaikan secara efisien. Tenaga

ahli, harga konstruksi bahan bangunan menjadi salah satu indikator utama berjalannya suatu pembangunan.

Dalam setiap tahap realisasinya, pemerintah desa melalui bendahara membuat laporan mengenai realisasi penggunaan alokasi dana desa. Pada tahap pelaporan tersebut, diawali dari kepala desa, kemudian melaporkan kepada bupati melalui camat, dan menginput data realisasinya pada siskeudes serta aplikasi desa waskita sebagai media pelaporan akuntabilitas pada tingkat Kabupaten di Daerah Demak. Sebagaimana yang diketahui dalam tabel 4.5 tentang realisasi pada bidang pembangunan, anggaran tersebut belum sepenuhnya direalisasikan terutama pada bidang kesehatan. dengan adanya tabel realisasi ADD tersebut, bidang yang sudah direalisasikan merupakan bidang yang sudah menjadi prioritas dalam rencana kerja pemerintahan sejak awal. Dimana untuk beberapa bidang pembangunan terutama dalam perbaikan infrastruktur serta pemberdayaan masyarakat sudah direalisasikan serta dilaporkan pada sistem keuangan desa (siskeudes) dan desa waskita. Untuk pembangunan yang belum direalisasikan adalah sebesar 52.869.000 yaitu bidang pendidikan, penyelenggaraan operasional madin, perbaikan RTLH. Dilihat dari data realisasinya menunjukkan bahwa, dalam merealisasikan ADD Pemerintah Desa Bantengmati mengimplementasikannya sesuai dengan prioritas yang sudah disepakati dalam rencana kerja pemerintahan.

Dalam bidang pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa Bantengmati mengalokasikan Rp. 19.680.0000 untuk beberapa bidang, yang menjadi prioritas.

Prioritas tersebut diantaranya adalah bidang kepemudaan dan olahraga, karang taruna, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, insentif kepada lansia serta pelatihan guru paud. Masing masing dari bidang tersebut, sudah di realisasikan secara menyeluruh tanpa terkecuali. Dilhat dari data 4.6 bahwa pemberdayaan masyarakat tersebut memang bertujuan untuk meingkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengurangi kesenjangan. Dengan adanya realisasi yang tepat sasaran, maka output yang dihasilkan akan berkualitas. Berdasarkan hasil wawancara terkait dengan realisasi pelporan ADD dapat diketahui bahwa mekanismenya adalah sebagai berikut :

1. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) melaporkan hasil realisasi kepada kepala desa
2. Kemudian, kepala desa menyampaikan hasil laporan tersebut kepada bupati/walikota melalui camat
3. Setelah laporan disetujui oleh bupati/walikota, dilanjutkan dengan menginput laporan realisasi melalui siskeudes dan desa waskita. sebagai wujud akuntabilitas dan pelaksanaan asas transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa.
4. Pelaporan realisasi ADD dilakukan menggunakan dua metode :
 - a. Bersifat substantif, melalui musyawarah antara pemerintah desa bersama mitra kerja

- b. Bersifat normatif, pelaporan dilakukan kepada kepala desa, kemudian disampaikan ke bupati/walikota melalui camat

4.3.3 Upaya dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan perbaikan infrastruktur

Pemerintah Desa Bantengmati telah mengoptimalkan penggunaan dana desa yang telah dituangkan pada rencana kerja pemerintahan desa. Untuk mencapai output pembangunan yang maksimal, pemerintah desa Bantengmati mengajak masyarakat desa untuk berkontribusi baik dalam bidang perbaikan infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat. seperti halnya dalam bidang perbaikan infrastruktur, pemerintah desa ikut melibatkan masyarakat dalam hal pengawasan untuk masing masing wilayah. Pemerintah Desa Bantengmati berusaha untuk mengajak masyarakat berkontribusi menjadi kader kader dalam kegiatan yang didanai oleh dana desa. Seperti, mengajak para ibu rumah tangga untuk menjadi anggota PKK, mengajak para remaja bergabung menjadi anggota karang taruna, dan melibatkan semua masyarakat dalam beberapa pelatihan sablon dan bawang goreng. Secara umum pelatihan tersebut diselenggarakan oleh karang taruna atas rekomendasi dari aparat desa dengan persetujuan BPD dan juga masyarakat.

Dalam kaitannya untuk meningkatkan kualiat sumber daya manusia, Pemerintah Desa Bantengmati memanfaatkan SILPA dari ADD tahun lalu untuk pembelian operasional alat sablon guna memfasilitasi masyarakat untuk meningkatkan kuliatas dan melatih *softskill*. Selain untuk meningkatkan kualitas sumber daya

manusia, pelatihan sablon juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sebagai upaya untuk mengurangi kesenjangan kemiskinan, karena melalui kegiatan tersebut dapat menjadi peluang usaha dan meningkatkan perekonomian pada desa Bantengmati. Selain itu, pada Desa Bantengmati juga mengadakan pelatihan bawang goreng, sebagai usaha untuk memanfaatkan bahan baku yang sudah tersedia, dikarenakan sebagian besar masyarakat Desa Bantengmati bekerja sebagai petani yang melakukan budidaya bawang merah. Dengan pemanfaatan bahan baku dari hasil panen sendiri, dapat menjadi tambahan pendapatan bagi masyarakat setempat. dengan adanya kedua pelatihan bawang goreng dan juga sablon, secara tidak langsung pemerintah desa sudah memfasilitasi program pemberdayaan masyarakat untuk menuju desa yang memiliki sumber daya yang berkualitas dengan kesejahteraan yang terjamin. Dari hasil wawancara terkait dengan upaya upaya dibidang pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa Bantengmati merealisasikan kegiatannya melalui beberapa kegiatan yaitu :

1. Pembentukan anggota karang taruna, yang dijadikan wadah untuk memfasilitasi kegiatan kepemudaan untuk mengembangkan dan meningkatkan cipta, rasa, karsa dan potensi generasi muda dalam upaya pengembangan sumber daya manusai.
2. Pembentukan PKK, untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mengurangi ketimpangan sosial, serta membina potensi yang dimiliki masyarakat

3. Penyelenggaraan pelatihan sablon bagi masyarakat, dalam rangka meningkatkan potensi sumber daya manusia dan pendapatan ekonomi pada desa Bantengmati, pelatihan sablon dimaksudkan untuk dijadikan sebagai sebuah peluang usaha yang nantinya akan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.
4. Penyelenggaraan pelatihan bawang goreng, guna memanfaatkan hasil panen dari pertanian bawang merah. Pemerintah desa Bantengmati, bersama dengan Karang Taruna dan Mitra Kerja melakukan suatu inovasi untuk pengolahan bawang goreng. Dimana bawang merupakan sumber pendapatan dari masyarakat Desa Bantengmati. Untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi kesenjangan, pemerintah desa melakukan inovasi terhadap bawang. Dimana nantinya olahan bawang tersebut dapat menjadi sumber pemasukan dan peluang usaha bagi masyarakat sekitar.



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap realisasi pelaporan prioritas penggunaan ADD pada bidang perbaikan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat pada Desa Bantengmati, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pemerintah Desa Bantengmati menetapkan prioritas dana desa melalui kegiatan musrenbangdes yang melibatkan unsur masyarakat. Dari kesepakatan mengenai rencana penggunaan dana desa tersebut dialokasikan pada beberapa bidang yang diprioritaskan berdasarkan persetujuan bersama.
2. Pada tahap perealisasi Alokasi Dana Desa tersebut, aparat desa telah mengoptimalkan penggunaan dana desa sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dalam Rencana pembangunan Kerja Desa Bantengmati (RKP Desa), namun masih terdapat beberapa anggaran dan kegiatan yang belum direalisasikan.
3. Bidang pembangunan desa, difokuskan sebagai upaya untuk memperbaiki infrastruktur umum dan juga masyarakat, salah satunya dengan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Untuk infrastruktur umum, diprioritaskan untuk perbaikan, pembangunan jalan dan jembatan.
4. Untuk pemberdayaan masyarakat pada Desa Bantengmati, dilihat dari Alokasi Dana Desa-nya (ADD) telah dianggarkan secara maksimal,

namun untuk proses realisasinya belum berjalan dengan baik. Karena faktor penghambatnya berasal dari masyarakat yang belum mampu memaksimalkan penggunaan fasilitas yang bersumber dari ADD

5.2 Keterbatasan

Berdasarkan penelitian, yang telah penulis lakukan pada Desa Bantengmati Kecamatan Mijen Kabupaten Demak terdapat keterbatasan yaitu pada penelitian ini hanya membahas tentang realisasi dari alokasi dana desa terhadap objek pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat saja. Serta dalam proses pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, hasilnya kurang maksimal. Dikarenakan pada saat proses wawancara terhadap beberapa narasumber terdapat kunjungan kerja, sehingga mengakibatkan waktunya terbatas.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil dan keterbatasan dalam penelitian ini, penulis memiliki beberapa saran dari hasil analisis penelitian. Berikut adalah beberapa saran yang bisa penulis berikan :

1. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan untuk variabel penelitiannya bisa dikembangkan agar dapat mengetahui permasalahan yang mungkin belum ditemukan solusinya.
2. Untuk Pemerintahan Desa Bantengmati, dalam upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang pemberdayaan masyarakat, diharapkan agar kegiatan sosialisasi dilakukan secara rutin dengan menghadirkan narasumber yang

menarik, melakukan pemetaan terhadap minat masyarakat desa, serta untuk orientasi ADD lebih diarahkan pada sumber daya manusia daripada aset fisik.

3. Untuk menghasilkan output pembangunan yang berkualitas, sebaiknya dalam proses realisasinya pelaksanaannya dapat dioptimalkan kembali.
4. Untuk masyarakat desa, diharapkan mampu menggunakan kebijakan fasilitas desa secara sadar. Hal ini bertujuan agar kemandirian dan kualitas sumber daya manusia dari masyarakat berkualitas.



DAFTAR ISI

- Menteri Dalam Negeri. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Desa
- Sari, R. N. (2015). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Kantor Pemerintahan Desa Ngasem, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri). *Jurnal Administrasi Publik*, 3(11), 1880-1885.
- Minang, H. P., Digdowiseiso, K., & Sugiyanto, E. (2021). Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Memperdayakan Masyarakat Desa: Studi Kasus Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. *Ilmu dan Budaya*, 42(73).
- Umbing, G. B., & Halim, A. Evaluasi Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Dana Desa (Studi Pada Desa Ringinharjo Kabupaten Bantul). *Abdi Equator*, 1(1), 1-13.
- Merina, C. I., Nafsiah, S. N., & Hartono, E. (2021). Analisa Mekanisme Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Dampaknya Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Lembaga Desa Lubuk Kemiling. *Prosiding Semhavok*, 3(1), 52-59.
- Zulaifah, I. A. (2020). Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Jumpang, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(01).

LEGARANO, G. T. C., Pasoreh, Y., & Rembang. (2020). Peran Komunikasi Pemerintahan Dalam Menyampaikan Informasi Tentang ADD (ALOKASI DANA DESA) Di Desa Mariri Satu Kecamatan Poigar Kabupaten Bolalang Mongondow. *Acta Diurna Komunikasi*, 2(3).

Rimawan, M., & Aryani, F. (2019, September). Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia serta Kemiskinan pada Kabupaten Bima. In *Seminar Nasional Taman Siswa Bima* (Vol. 1, No. 1, pp. 374-379).

Edi Suharto (2017), *Pembangunan Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat : Kajian strategis Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*, bandung: Refika Aditama

Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Peraturan Bupati (PERBUP), Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021

Peraturan Menteri desa, Pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 11
Tahun 2019, Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014, Tentang Pedoman
Pembangunan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 2014, tentang Badan
Permasyarakatan Desa

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014, Tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara